

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2015). Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. Masyarakat sendiri sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain belum menjadi hal umum bagi sebagian daerah. Padahal seperti yang kita ketahui penyelenggaraan pemerintahan serta akuntabilitas pemerintahan yang dapat dilihat melalui laporannya tidak dapat diketahui tanpa

adanya pemberitahuan dari pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan acuan dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan, sehingga terciptanya pemerintahan yang baik sering disebut Good Governance. Bersatu dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau amanah (good governance) yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Pengertian Good Governance menurut (Mardiasmo, 2018) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Good governance menghendaki pemerintah dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, serta sumber daya pemerintah daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan

kemakmuran rakyat dan negara. Penerapan good governance tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Audit pada organisasi sektor publik tidak hanya mencakup audit atas laporan keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, namun juga audit kinerja yang merupakan perluasan dari audit tersebut. Menurut UU No. 15 Tahun 2004 audit kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi, efisien, dan efektivitas. Alasan pentingnya dilakukan audit kinerja adalah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, selain itu audit kinerja juga sebagai alat evaluasi dan pengarah dalam pengalokasian sumber dana masyarakat, karena dengan dilakukannya audit kinerja akan terwujud pengendalian terhadap kinerja dari pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan laporan keuangan yang dikeluarkan pemerintah.

Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel menuntut pemerintah menyusun serta menyajikan laporan keuangan publiknya sesuai pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam SAP No. 01 menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah.

Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah tetapi yang paling penting penyajian laporan keuangan pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban

dari pemerintah terhadap masyarakatnya sebagai sumber dana. Tujuan-tujuan itulah yang menyebabkan diperlukannya sebuah standar yang paling tidak harus dimiliki oleh laporan yang dibuat pemerintah, standar ini juga memuat pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Persyaratan minimum yang harus dipenuhi laporan keuangan pemerintah paling tidak adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hal tersebut disebabkan karena organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan sumber dana publik sehingga harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik dari laporan keuangan.

Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. (Riyanto, 2003) menyatakan perlunya penelitian mengenai pendekatan kontinjensi berkaitan dengan kejelasan sasaran anggaran dan dampaknya agar hasil yang diperoleh akan lebih konsisten.

Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standart yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan

menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor. SAP ditetapkan dengan PP no. 24 tahun 2004 dan SAP sudah harus diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2005. Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab atas akuntabilitas publik serta merupakan salah satu ukuran keberhasilan (kinerja) pemerintah daerah (Jamason Sinaga, 2005). Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menggunakan accrual basis accounting dalam penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada IPSAS (Internal Public Sector Accounting Standards), (KSAP, draf SAP, 2008).

Standart Akuntansi Pemerintah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkat keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (Broadbent, 1999). Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah (Indrawati Yuhertins, 2007). Akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan atas pelaksana keuangan daerah. Dengan penerapan SAP akan mempermudah pengguna informasi keuangan dalam memahami dan mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah serta merupakan wujud dari

akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan keuangan daerah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ngawi merupakan salah satu dinas yang telah menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun 2015. Berlakunya Permendagri Nomor 64 tahun 2013 ini menjadi dasar hukum penerapan SAP berbasis akrual pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngawi. Dalam penerapan SAP akrual tersebut melibatkan sumber daya manusia dan teknologi (software). Laporan keuangan disajikan dalam periode tahunan, semesteran dan caturwulan guna kepentingan berbagai pihak.

Fenomena yang sering timbul pada SKPD Kota Ngawi yaitu terlambatnya penyampaian analisis laporan keuangan dari beberapa dinas, hal tersebut disebabkan adanya kendala beberapa sektor, diantaranya dokumentasi maupun sinergnitas. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Kabupaten Ngawi telah membentuk suatu kerjasama antara pegawai untuk asistensi laporan keuangan sekaligus melakukan penetapannya. Adapula kasus tahun 2015 dugaan korupsi Progam Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi senilai Rp 128.900.000, dan kasus dugaan korupsi proyek air minum dan sanitasi dengan total berbasis masyarakat di lingkup Dinas Kesehatan Ngawi senilai Rp 845.300.00 (Solopos.com)

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ika Nurani Oktavia Di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi, khususnya Badan Keuangan telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, baik itu dari segi perencanaan, penyusunan anggaran daerah dengan mengacu pada prinsip-prinsip anggaran seperti: transparansi anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, pelaksanaan atas perencanaan anggaran, penatausahaan atau pembukuan anggaran, pelaporan atas transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah daerah, pertanggung jawaban atas laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat serta pengawasan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Good Governance, Audit Kinerja dan Standart Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan seperti diatas, adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Good Governance berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah?
2. Apakah audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah?
3. Apakah standart akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah?

4. Apakah Good Governance, audit kinerja, dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah variabel di atas maka tujuan dari peneliti ini, yaitu untuk:

1. Mengetahui pengaruh Good Governance terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah
2. Mengetahui pengaruh Audit Kinerja terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah
3. Mengetahui pengaruh Standart Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas informasi keuangan.
4. Mengetahui pengaruh Good Governance, audit kinerja, standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih untuk semua pihak dalam, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan materi yang berhubungan dengan sector publik.

2. Bagi OPD Kabupaten Ngawi

Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan terkait pengaruh Good Governance, Audit Kinerja dan Standart Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia mengenai stabilitas laporan keuangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan agar menambah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya pada bidang keuangan pemerintah dan dapat dijadikan referensi pembelajaran mengenai stabilitas laporan keuangan yang dipengaruhi oleh Good Governance dan Standart Akuntansi Pemerintah.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan yang dapat digunakan akan dalam penelitian selanjutnya.